

Pergulatan Sejarah, Ekonomi, Agama dan Politik dalam Pembentukan Kekerasan Simbolik terhadap Keterwakilan Perempuan di Desa Tabanio

Noviana Sari ^{1,*}; Siti Mauliana Hairini ²; Pathurrahman ³; M. Syarif Hidayat ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia; noviana_sari@ulm.ac.id

*Correspondence : noviana_sari@ulm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pergulatan berbagai faktor dalam melahirkan kekerasan simbolik terhadap perwakilan politik perempuan di desa pesisir. Perempuan di Tabanio memiliki eksistensi politik yang sangat minim sehingga berdampak pada kebijakan pemerintah desa. Penelitian ini menemukan tiga faktor dalam pembentukan kekerasan simbolik yang bersifat saling terintegrasi untuk memperkuat maskulinitas sebagai kekerasan simbolik pada perempuan. Faktor pertama, Tabanio memiliki begitu banyak sejarah tentang kepahlawanan laki-laki yang dapat digunakan sebagai reproduksi kekerasan budaya. Faktor kedua, ekonomi di sektor swasta dan tokoh agama seperti Habib turut memperkuat pemisahan antara laki-laki dan perempuan serta melahirkan reproduksi kekerasan sosial. Faktor pembentukan terakhir adalah reproduksi kekerasan politik yang diciptakan pada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga politik formal yang semakin menajamkan pengasingan perempuan dalam keterwakilan politik Pemerintahan Desa. Keseluruhan faktor tersebut menjadi lapisan-lapisan yang Bersatu padu dalam melegitimasi struktur dominasi terhadap politik perempuan di wilayah pesisir.

ABSTRACT

This research aims to explain how the multiple causes create the symbolic violence works toward women political representatives in the coastal village. Women in Tabanio have a lack of political existence that impact toward the village government policy. This research has found three forms of symbolic violence that strengthen each other to build masculine as symbolic violence to women. First, Tabanio had so much history about men's heroism that can be used as cultural violence reproduction. Second, the economy in the private sector and religious figures like Habib have emphasized the distinction between men and women and have created social violence reproduction. The last form is political violence reproduction has been created in BPD (Badan Permusyawaratan Desa) as a formal institution to alienate women in political representation for Village Government. The whole of multiple factors has mutually aggregated to legitimate the structure of domination toward the political of women in the coastal area.

Kata kunci

Kekerasan Simbolik, Perempuan, Pesisir

Keywords

Symbolic violence, women, coast

Pendahuluan

Lautan hingga pesisir selalu bercerita soal ketangguhan para lelaki kekar yang menerjang ombak dengan watak dan perawakan yang keras (ungendering, gender imbalance). Linda Grant De Pauw dalam bukunya *Seafaring Women* mencatat bahwa dalam sejarah satu-satunya perempuan yang ditemukan di laut adalah boneka yang menonjol dari haluan kapal (MacNeil & Ghosh, 2017). Bahkan, takhayul yang mengatakan bahwa membawa perempuan di kapal adalah nasib buruk telah menjadi momok yang mengkung-kung perempuan dalam sejarah pelayaran di laut selama berabad-abad (Dorothy Denneen Volo, 2001) Cerita ini semakin meluas hingga menciptakan bias gender yang mempengaruhi interaksi di lautan (MacNeil & Ghosh, 2017). Nelayan sebagai salah satu aktor dalam dunia perikanan serta pengelolaan sumberdaya perikanan juga tak bisa dilepaskan dari cerita maskulinitas. laki-laki selaku aktor utama dalam maskulinitas nelayan membuat posisi perempuan semakin terpinggirkan dari dunia perikanan di laut hingga daratan pesisir (Azhar Firdausi et al., 2021).

Studi tentang isu gender dalam kehidupan pesisir dan laut telah mengungkapkan ketidaksetaraan gender dan sosial yang mendalam. Studi tata kelola kehidupan laut sebagian besar buta gender, terlepas dari sifat sektor yang sangat gender yang mana perempuan sangat penting dalam sektor perikanan. Peran perempuan seringkali tidak terdokumentasikan dan oleh karena itu tidak terlihat oleh peneliti dan pembuat kebijakan. Hal ini juga meminggirkan perempuan dalam implementasi kebijakan sektoral dan meningkatkan kerentanan mereka, baik pada pengelolaan perikanan skala kecil hingga skala industri (Harper et al., 2013; Maliniak et al., 2008). Oleh karena itu, tak hanya pada praktik implementasi namun pada tataran teoritik bidang laut dan perikanan perempuan selalu memiliki peran minor didalamnya.

Sejak diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, maka otoritas desa di Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintah semakin diperkuat (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014). Aturan ini juga menjadi angin segar bagi perempuan desa, dimana dalam pasal 58 telah diatur lebih lanjut mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui unsur anggota BPD. Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD menjamin keterwakilan perempuan (*PP Nomor 43 Tahun 2014*, n.d.).

Perempuan pesisir di desa tabanio menjadi salah satu studi kasus yang tidak terlepas dari aturan keterwakilan perempuan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Pada dasarnya, Tabanio merupakan salah satu desa kecil yang terletak di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, yang awalnya hanya kampung kecil di sekitar Sungai Tabanio di pantai selatan Borneo (Apriati, 2018). Anggota BPD desa ini

berjumlah sembilan orang dengan satu orang perwakilan perempuan di dalamnya. Sejak diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2004, perjalanan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa menunjukkan tak hanya minim secara kuantitas bahkan kualitas. Tingkat pendidikan yang rendah dan pernikahan dini telah menjadi takdir sosial yang didesain bagi perempuan Desa Tabanio agar terus menerus menjadi pihak yang bergantung pada laki-laki (agustina, 2022).

Sejarah desa Tabanio sangat kental dengan pergulatan maskulinitas, dimana sempat dikenal luas sebagai wilayah penghasil lada, pusat perdagangan Inggris, markas bajak laut hingga basis perjuangan di masa Revolusi fisik di banua yang mana aktor utamanya adalah laki-laki (Kristiyanti Mariana, 2016). Sejalan dengan pendapat Pierre Bourdieu (1979, 1991, 2001), bahwa perempuan seringkali menjadi pihak yang secara sukarela menyerah pada hubungan dominasi dan bahkan disetujui secara hukum yang mengakibatkan dan mempertahankan ketidakseimbangan kekuatan sosial. Kuatnya Kontrol kekerasan simbolik terhadap perempuan Desa Tabanio ini bahkan tidak mampu didobrak oleh regulasi otonomi desa yang memaksa untuk memperkuat partisipasi perempuan melalui UU Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri No. 110 tahun 2016. Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD selaku representasi perjuangan perempuan desa seakan diperlakukan sebagai obyek baru bagi permainan dominasi maskulinitas. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam pada studi kasus kekerasan simbolik dalam anggota BPD perwakilan perempuan di Desa Tabanio sebagai wilayah pesisir tertua di Kalimantan Selatan.

Metode

Metode penelitian pada studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2007). Studi ini dilakukan di Desa Tabanio, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Desa Tabanio merupakan wilayah pesisir di Kalimantan Selatan yang dikenal wilayah pesisir paling bersejarah (Mansyur, 2021). Perempuan Desa Tabanio dipilih sebagai obyek penelitian dengan rasionalitas minimnya jumlah keterwakilan perempuan di BPD Desa Tabanio, tak hanya itu Tabanio juga menjadi wilayah yang sangat kental dengan sejarah namun tidak ditemukan satupun catatan mengenai eksistensi perempuan didalamnya. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan multi sumber bukti sebagai basis analisis data. Penggunaan multi sumber bukti bertujuan untuk memberi peluang kepada peneliti untuk mengarahkan diri pada isu-isu historis, sikap, dan observasi yang lebih luas (Creswell, 2007). Karenanya konklusi dan temuan yang dihasilkan pada studi ini akan lebih meyakinkan dan tepat karena didasarkan pada beberapa sumber informasi yang berlainan, mengikuti bentuk pendukungnya. Berikut Langkah-langkah pencarian data dalam metode pengumpulan data triangulasi guna memperoleh validitas data dari multi sumber bukti yaitu desk study, observasi langsung, wawancara mendalam (indepth interview), serta rekaman arsip. Adapun

informan yang menjadi target dari studi ini meliputi Anggota BPD Desa Tabanio perwakilan perempuan, Kepala Desa Tabanio, Ketua BPD Desa Tabanio, Aparatur Desa Tabanio, Masyarakat Desa Tabanio.

Hasil dan Pembahasan

Studi ini akan menganalisis praktik kekerasan simbolik terhadap perwakilan politik perempuan di BPD Desa Tabanio dengan menggunakan pendekatan sosiologis Pierre Bourdieu. Bourdieu menyebutkan bahwa Kekerasan Simbolik dipraktikkan melalui dominasi modal budaya dan modal sosial yang berlangsung secara tidak sadar dalam kehidupan masyarakat hingga mendiskriminasi kelompok/gender tertentu (Syahril, 2014). Pierre Bourdieu menggunakan konsep kekerasan simbolik untuk merujuk pada pemaksaan simbol dan sistem makna pada suatu kelompok atau kelas sebagai praktik yang terlegitimasi. Kekuasaan bekerja secara tersembunyi dibalik legitimasi untuk menciptakan ketimpangan dalam relasi antar kelompok hingga gender (Garrett, 2007). Praktik legitimasi terus bekerja melalui struktur budaya dan relasi-relasi kekuasaan secara sistematis yang akhirnya membentuk mekanisme reproduksi (dominasi). Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron, dalam karyanya *Reproduction in Education, Society and Culture*, mengklaim bahwa tindakan pedagogis adalah fondasi dasar dari pelaksanaan kekerasan simbolik, dan itu ada dalam tiga bentuk: 1. Pendidikan informal yang muncul dari interaksi antar anggota masyarakat, 2. Pendidikan dalam keluarga, dan 3. Pendidikan formal. (Bourdieu dan Passeron, 1990).

Kekuatan simbolik lembaga pedagogik dalam rumusan ini harus dilihat sebagai fungsi dari posisinya dalam jaringan relasi kekuasaan. Selain itu, Bourdieu mendefinisikan kekerasan simbolik sebagai pemaksaan sistem simbol dan makna, yang terdiri dari prosedur berikut: tindakan pedagogik, otoritas pedagogik, sistem nilai pedagogik, dan kerja pedagogic (Elliot B. Weininger, 2005). Proses reproduksi memerlukan reproduksi budaya kelas dan mekanisme kekuasaan. Konsep-konsep dasar sastra Bourdieuan ini sangat penting dalam menganalisis bentuk-bentuk struktural di bidang sosial dalam relasionalitas organik, dan berkontribusi pada pemahaman kritis dari diskusi di lapangan seperti kasus yang terjadi pada perwakilan politik perempuan di BPD Desa Tabanio.

1. Dongeng Sejarah Laki-laki menjadi momok bagi Perempuan Tabanio

Reproduksi budaya menurut Bourdieu terjadi dimana medan-medan budaya tidak lagi ditransformasikan melalui revolusi radikal melainkan restrukturisasi secara diam-diam yang berhasil. Reproduksi budaya dilakukan dalam praktik ketimpangan isu yang dipilih untuk ditampilkan serta isu yang tidak diperlihatkan tanpa harus ditiadakan. Reproduksi budaya ini juga ditransformasikan melalui sistem komunikasi pedagogik sehingga kelangsungan komunikasi antar generasi-generasi intelektual menjadi media untuk menginformasikan pemikiran dan memperkokoh suatu pengetahuan sebagai suatu kebiasaan berpikir secara umum

bagi seluruh generasi yang mana menyembunyikan budaya dominasi dibalikinya (Chris Jenks, 1993).

Bourdieu berpendapat bahwa Modal budaya menjadi instrumen utama dalam menciptakan distingsi tanpa resistensi dalam suatu kelompok seperti gender di masyarakat. pengetahuan direproduksi untuk menciptakan kondisi yang didesain untuk membuat ketimpangan terlihat adil dan seimbang (Bourdieu & Passeron, 1990). Kekerasan simbolik diciptakan melalui komunikasi pedagogic dalam mereproduksi modal budaya untuk di tukarkan menjadi dominasi simbolik dalam suatu kelompok dimasyarakat. Praktik Dominasi maskulin pada perempuan di Desa Tabanio dimulai dengan produksi wacana sejarah sebagai pedagogic bagi masyarakat Desa untuk menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam sejarah perjuangan Desa Tabanio. Rekam jejak sejarah masa lalu kampung Tabanio sebagai arena perlawanan dan pergolakan kekuasaan ini tidak hanya membuat konstelasi politik desa yang selalu dinamis, namun juga ditengarai turut membentuk dominasi habituasi maskulin pada masyarakat Tabanio yang berkarakter keras dan tidak kenal takut. Hal ini cukup beralasan, mengingat Desa Tabanio memiliki catatan panjang dalam menceritakan laki-laki yang menjadi tokoh utama dalam pertarungan sejarah di Desa Tabanio.

Dalam literatur sejarah, Tabanio sebagai kampung tercatat sudah eksis sejak abad ke-17 sebagai wilayah strategis dan menguntungkan bagi aktifitas perdagangan (Fahmi, 2018). Tabanio terletak di tepi Laut Jawa dan Selat Makassar hingga dikenal menjadi bagian jalur perdagangan rempah nusantara (Mansyur, 2021). Selain menjadi wilayah persinggahan kapal-kapal dagang dari luar pulau Kalimantan, Tabanio juga menjadi daerah penghasil lada dan komoditas perikanan yang melimpah. Wilayah Tabanio, yang terletak di tepi pantai berfungsi sebagai pintu gerbang pedagang luar yang ingin berdagang ke Banjarmasin. Tabanio juga memiliki sejarah sebagai arena pergulatan kuasa colonial, bajak laut, hingga kesultanan Banjar (bpcbkaltim, 2018). Pada tahun 1664, East India Company (EIC)-Inggris telah melakukan perjanjian dagang dengan Sultan Banjar keempat, Sultan Mustainbillah (1650-1678) untuk berdagang di area Tabanio pada kurun waktu yang bersamaan, keberadaan Tabanio sebagai wilayah terbuka yang mudah diakses menjadikan area ini markas bajak laut yang tidak hanya memiliki kepentingan ekonomi namun juga politik yang terkait dengan konflik di Kesultanan Banjar (Fahmi, 2018). akibat konflik di kesultanan Banjar, Tabanio turut terlibat menjadi wilayah pelarian sekaligus basis penyerangan dan pertahanan dalam pertikaian pewaris tahta di Kesultanan Banjar pada Abad-18. Pada periode berikutnya, tanggal 6 Juli 1779 sejarah pergulatan kuasa di Tabanio mengantarkan wilayah ini menjadi wilayah monopoli perdagangan oleh VOC. Perjanjian VOC dan Kesultanan Banjar tidak hanya mengatur perdagangan namun juga ijin pembangunan Benteng Pertahanan VOC di Tabanio (bpcbkaltim, 2018).

Salah satu catatan sejarah Tabanio yang banyak dikenal oleh masyarakat adalah cerita pada masa perang Banjar tahun 1859, yang mana sekelompok pejuang di bawah Kiai Demang Lehman, Kiai Langlang (Kiai Langlang) dan Haji Boejasin (Haji Buyasin) menduduki benteng di Tabanio dan menewaskan pejabat Gezaghebber Maurits bersama anak buahnya (bpcbkaltim, 2018). Sehingga reruntuhan situs bersejarah benteng Tabanio menjadi bukti nyata akan aksi kepahlawanan yang terus dikenang oleh masyarakat desa. Pada era Revolusi Fisik 1945-1949 keberadaan kampung Tabanio juga memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dimana kepala kampung Tabanio memberikan bantuan yang diperlukan pejuang ekspedisi Tentara ALRI Divisi IV A Pertahanan Kalimantan (Mansyur, 2021). Bahkan pasca kemerdekaan Indonesia, wilayah utara Tabanio (yang sekarang menjadi wilayah Hilir Kampung Tabanio) pernah menjadi basis gerombolan pemberontak DI-TII di bawah komando Ibnu Hajar (Zainal Abidin, 2022). Sederet catatan sejarah penting yang terukir dalam literatur hingga menjadi cerita rakyat di masyarakat Desa Tabanio telah menjadi pengetahuan yang diterima begitu saja tanpa tandingan. Deretan cerita masa lalu tersebut menjadi pedagogic yang bekerja untuk menonjolkan budaya maskulin yang tanpa sadar meminggirkan unsur-unsur perempuan didalamnya. Catatan sejarah menjadi modal budaya untuk mereproduksi simbolik maskulin dimasyarakat dimana cerita kepahlawanan laki-laki yang Tangguh dan gagah berani memonopoli sejarah desa ini. Praktik reproduksi budaya dalam melakukan kekerasan simbolik terhadap perempuan Tabanio dilakukan melalui dua mekanisme yaitu ketidaksetaraan dalam pemilihan literasi pada catatan perjalanan sejarah Tabanio dan kedua melalui komunikasi pedagogic yang terus ditransformasikan melalui cerita sejarah maskulinitas dari satu generasi ke generasi selanjutnya di Tabanio.

2. Ekonomi dan Agama menjadi Jurang Pemisah Perempuan dalam Relasi Sosial

Pada dasarnya reproduksi sosial terdiri dari reproduksi hubungan hierarki yang bertingkat untuk memapankan posisi dominasi terhadap suatu kelompok atau individu di ruang sosial. Kelompok dominan akan berupaya melanggengkan posisi mereka dan melestarikan dominasi yang terlegitimasi secara sosial. Seperti apa yang dikatakan Marx, bahwa "gagasan yang berkuasa adalah gagasan dari kelas penguasa" (Appelrouth & Edles Laura Desfor, 2021). Bourdieu dalam bukunya '*reproduction in education, society, and culture*' mencoba mempertanyakan mungkinkah komunikasi pedagogic sederhana mampu bertahan bahkan melampaui sistem logika, sehingga memunculkan pertanyaan yang lebih jauh mengenai bagaimana komunikasi pedagogic bekerja, melalui sarana, kondisi social seperti apa yang membuat hubungan pedagogik bertahan hingga menjadi persetujuan tanpa sadar bagi objeknya (Bourdieu & Passeron, 1990). Tahapan tradisi dan konservasi sosial yang dipaparkan oleh Bourdieu sejalan dengan proses tahapan Reproduksi sosial kekerasan simbolik terhadap perempuan Desa Tabanio yaitu kepemilikan otoritas

pedagogic dan otoritas Bahasa, relasi dalam Bahasa, dan konservasi komunikasi melalui bidang ekonomi dan agama.

Kepemilikan otoritas pedagogik dan otoritas Bahasa pada kasus kekerasan simbolik terhadap perempuan Desa Tabanio dimulai dalam lingkup pembagian peran ekonomi paling privat yaitu rumah tangga. Relasi dalam rumah tangga di tentukan oleh pembagian kerja antara suami dan istri. Secara general, Desa Tabanio memiliki pembagian peran suami istri tak banyak berbeda dengan daerah lain dimana suami menjadi sosok kepala keluarga yang berperan penuh Desa dalam sektor produktif dan istri berperan di sektor reproduktif. Desa Tabanio merupakan basis mata pencaharian nelayan dan petani yang mana besar pengaruhnya dalam praktik pembagian peran serta relasi komunikasi pedagogik antara suami dan istri. Mayoritas keluarga di Desa Tabanio sangat bergantung pada penghasilan nelayan dan juga pertanian, Dimana jumlah penduduk yang berprofesi petani mencapai 1513 orang dan nelayan mencapai 818 orang, bahkan sebagian besar keluarga nelayan juga sekaligus berprofesi petani.

Mata pencaharian nelayan sebagai profesi dominan pada masyarakat menciptakan budaya maskulin tidak hanya pada individu bahkan dalam relasi keluarga, dimana Laki-laki menjadi aktor tunggal dalam profesi ini dikarenakan menjadi nelayan memiliki stigma sebagai pekerjaan yang sangat kasar, dibutuhkan tenaga besar, bahkan memakan waktu yang tidak sedikit yaitu rata-rata 14 hari terombang-ambing dilautan disetiap bulannya. Pekerjaan Nelayan yang begitu melekat pada budaya maskulin ini dilihat sebagai potensi terbesar bagi perekonomian masyarakat desa, karena Berdasarkan data yang diperoleh, dalam satu tahun nelayan Tabanio mampu menghasilkan tangkapan ikan Tongkol/Cakalang mencapai 1.530 ton/tahun, sedangkan ikan Tenggiri mencapai 1.033 ton/tahun, dimana harga 1 kilogram Ikan Tenggiri kering berkisar 85.000,- sampai 95.000,- rupiah (muhammad Lili, 2022). Sehingga Laki-laki tak hanya mendapatkan otoritas dengan jenis kelamin yang mendominasi budaya, namun juga pekerjaan yang begitu dominan dalam perekonomian masyarakat desa pesisir ini menjadikan mereka memiliki otoritas penuh dalam rumah tangga.

Agama dalam relasi dan konservasi terhadap Bahasa diperuntukkan memapankan reproduksi distingsi habitus secara sosial. Seluruh penduduk yang bermukim di Tabanio memeluk agama Islam. Selain dikenal sebagai desa nelayan, penduduknya juga dikenal sering mengadakan acara-acara keagamaan serta memiliki ketaatan yang cukup tinggi pada pemuka agama. Religiusitas penduduk desa ditandai dengan tempat ibadah yang cukup banyak yaitu terdapat 8 surau (langgar) dan 1 mesjid, serta 1 bangunan bekas pesantren yang dijadikan Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Masyarakat desa Tabanio juga dikenal sangat fanatik dengan sosok Habaib (habib), para *habib* ini juga memegang peranan penting dalam aspek keagamaan. Istilah *habib* sendiri adalah sebuah gelar yang diberikan masyarakat untuk menyebut

orang (tokoh) agama yang merupakan keturunan (cucu) dari Nabi Muhammad SAW (M. Albar Robbani Barot Isrofil & Indria Liestyasari, 2015). Berbagai kegiatan keagamaan seperti Tabligh Akbar, Haulan para alim-ulama, acara Maulid dan peringatan Isra-Mi'raj yang diselenggarakan di desa ini selalu mengundang para habaib untuk memberikan ceramah bagi warga desa.

Desa Tabanio memiliki satu sosok Habib yang paling berpengaruh yaitu Habib Nunci. Beliau adalah sosok paling dihormati serta dipatuhi oleh mayoritas penduduk desa. Tidak hanya itu sosok Habib Nunci juga dikenal luas di wilayah lain sekitar Tabanio karena beliau seorang tokoh yang memiliki jaringan luas kepada para ulama di Kalimantan Selatan. Meskipun belum lama Habib Nunci wafat, pengaruh beliau masih begitu kuat dalam ingatan masyarakat. Fenomena Habib yang selalu ditandai dengan kepemilikan jenis kelamin laki-laki turut memperkuat distingsi antara laki-laki dan perempuan dalam relasi sosial penduduk desa. Distingsi habitus laki-laki terhadap perempuan terjadi akibat hubungan timbal balik yang saling memperkuat antara proses struktural arena pesisir yang religius dan fanatik akan ketokohan habib dan kepentingan habitus laki-laki dalam memonopoli pekerjaan pedagogik. Dominasi laki-laki atas perempuan Desa Tabanio ini kemudian diformalkan dalam pekerjaan politik yang homogen dan ortodoks. Pekerjaan rutin ini menghasilkan budaya politik standar dan ritual di mana agen-agen sistem politik ini memperkuat nilai mereka sendiri dengan memastikan reproduksi pasar yang memberikan nilai itu kepada mereka (Jenkins et al., 1993)

3. Ekonomi dan Agama menjadi Jurang Pemisah Perempuan dalam Relasi Sosial

Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron dalam karyanya yang berjudul "Reproduction in Education, Society and Culture", yang diterbitkan pada tahun 1970 telah mengkaji secara intens tentang kekerasan simbolik melalui pemeliharaan tatanan yang mapan, dan peran pendidikan di dalamnya (Bourdieu & Passeron, 1990). Bourdieu dan Passeron menjelaskan pentingnya peran yang diberikan oleh sistem pendidikan Prancis melalui praktik ujian. Kekerasan simbolik menjadi semakin mapan melalui sistem yang diformalkan dalam Lembaga yang abash. Ujian dalam Lembaga Pendidikan sebagai mekanisme formal untuk melakukan seleksi hingga eksklusi oleh kelompok dominan untuk tetap mempertahankan posisi mereka.

Pendelegasian kekuasaan pada lembaga formal yang memiliki otoritas dalam melakukan seleksi melalui mekanisme "ujian" diperuntukkan agar para kelompok dengan hak istimewanya dapat melalui proses seleksi yang terkesan adil dan sepenuhnya netral. Melalui institusi formal, keputusan yang dibuat dinilai objektif tanpa cela untuk keuntungan kepentingan-kepentingan politik dan sosial para kelas dominan guna mengelabui ideologi-ideologi demokratis. Cara ini dinilai berhasil untuk mereproduksi tatanan yang mapan untuk menciptakan ketimpangan kuasa dibalik sistem demokrasi itu sendiri. Stabilitas sosial diciptakan melalui seleksi terkontrol dari sejumlah individu - dimodifikasi dalam dan untuk peningkatan individu - dan seterusnya. Pada demokrasi modern, institusi formal yang kredibel

layaknya sekolah yang mampu menjadi "l'Ecole Uberatrice", sebagai kekuatan pembebas mampu yaitu pemilihan umum (pemilu) yang menjadi Lembaga otoritas dalam melanggengkan kekuasaan kelompok dominan pada panggung politik di dalam demokrasi.

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu prasyarat demokrasi bagi negara yang menganutnya. Penyelenggaraan secara regular merupakan tuntutan normative dari sistem yang demokratis. Pada praktiknya, pemilu menjadi ajang kompetisi untuk meraih jabatan-jabatan publik yang telah terlegitimasi oleh suara rakyat. Sebagai negara yang menganut system demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1955 yang hingga kini terus berkembang hingga ketinggian pemerintahan Desa. Berdasarkan aturan perundang-undangan Nomor 06 tahun 2014 tentang desa, memberikan mandate untuk membuka ruang kemandirian dan otonomi pada pemerintahan desa yang juga diikuti oleh pemilihan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*, 2016)

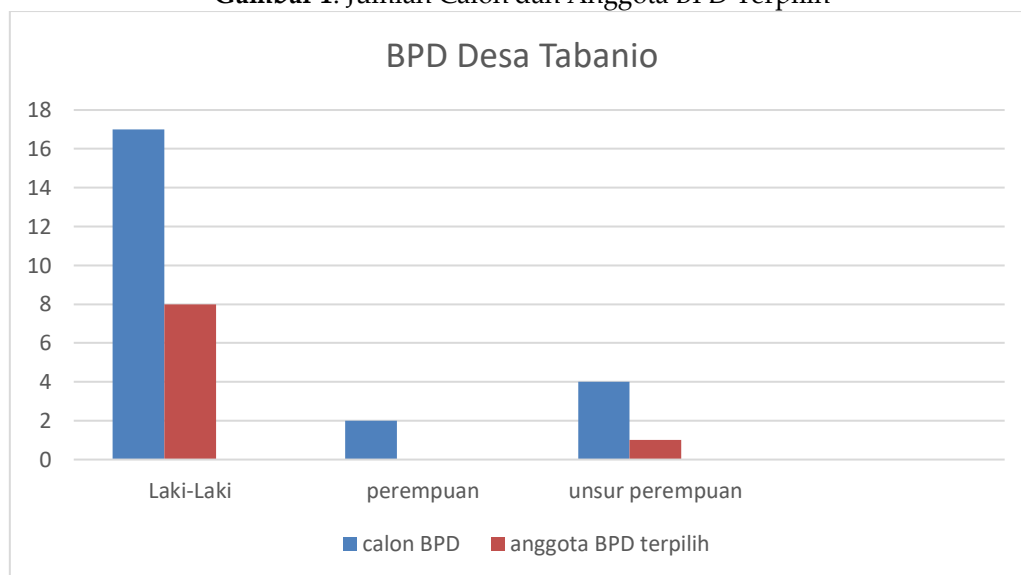
Pemilihan anggota BPD sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 pada Permendagri No 110 tahun 2016 disebutkan bahwa "anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan". Demokratis menjadi konsep besar bernaungnya praktik kekerasan simbolik yang menjadikan pemilihan sebagai alat memapankan asimetris kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di Desa. Keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota BPD telah diatur untuk mendapatkan hak istimewa yang mana telah dituangkan dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi "Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan" selanjutnya pemilihan BPD di Desa Tabanio di atur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 122 Tahun 2020 .

Perwakilan perempuan yang dijamin oleh Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 122 Tahun 2020 dalam pasal 14 berjumlah satu orang yang mana ditujukan untuk mewakili perempuan desa dan dipilih oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih dan wilayah pemilihan untuk keterwakilan perempuan adalah wilayah Desa (Bupati Tanah Laut, 2020). Pemilihan unsur perempuan ditujukan untuk memperkuat kelembagaan BPD yang didesain sebagai lembaga demokratis yang pengisian keanggotaannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa atau melalui musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Jalur istimewa yang diberikan kepada perempuan menjadi bukti bahwa demokrasi telah bersepakat dengan adanya ketimpangan kuasa antara laki-laki dan perempuan serta memberikan legitimasi

pada ketimpangan tersebut dengan mendefinisikan perempuan sebagai subyek marginal dibandingkan laki-laki.

Desa Tabanio memiliki anggota BPD 9 orang dengan satu orang perwakilan unsur perempuan. Pemilihan anggota BPD di Desa Tabanio menggunakan pemilihan langsung oleh masyarakat desa baik itu bagi calon anggota BPD kewilayahan maupun unsur perempuan. Perempuan di Desa Tabanio dihadapkan dengan dua arena pemilihan yang mana mereka memiliki pilihan untuk mengikuti pencalonan melalui wilayah/dusun maupun melalui unsur keterwakilan perempuan. Meskipun perempuan memiliki kuantitas arena pemilihan yang lebih besar namun partisipasi perempuan dalam pencalonan sebagai anggota BPD di Desa Tabanio masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. calon anggota BPD keterwakilan unsur perempuan berjumlah 4 orang, sedangkan calon anggota BPD keterwakilan wilayah berjumlah 19 orang yang terdiri dari 17 laki-laki dan 2 orang perempuan. Namun keterpilihan perempuan di BPD Desa Tabanio hanya 1 orang dari keterwakilan unsur perempuan.

Gambar 1. Jumlah Calon dan Anggota BPD Terpilih



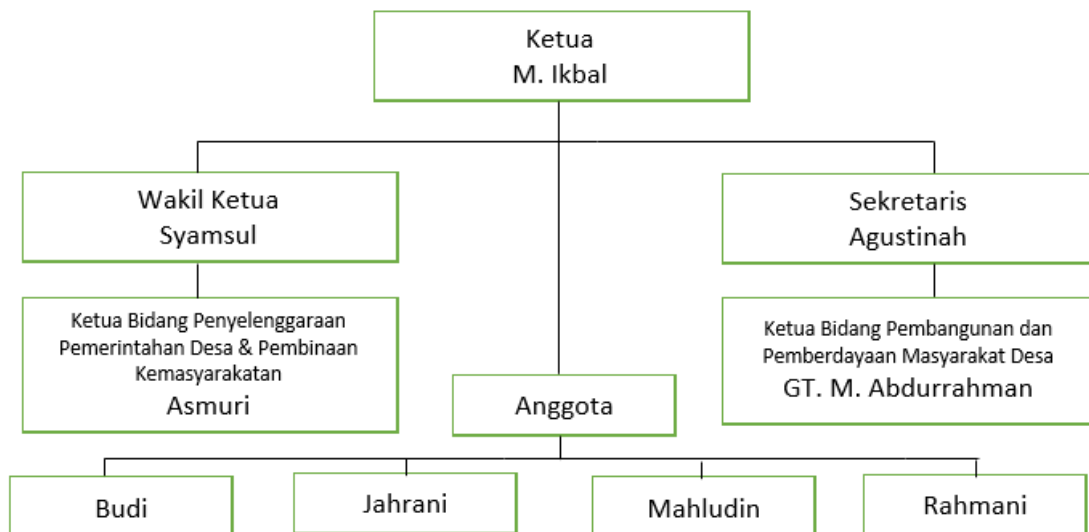
Sumber: Laporan Desa Tabanio Mengenai Calon Anggota BPD Terpilih

Pemilihan langsung anggota BPD Tabanio yang dilaksanakan pada 2020 menghasilkan 8 anggota BPD laki-laki yang terpilih melalui perwakilan dusun dan 1 orang perempuan yang terpilih melalui pemilihan unsur perempuan (Madiansyah, 2022). Hal ini membuktikan bahwa demokrasi di desa pesisir ini masih didominasi dengan kepemilikan simbolik laki-laki. perempuan desa hanya mampu terpilih jikalau arena pemilihannya dipisahkan dari laki-laki. pemilihan langsung yang mempertarungkan laki-laki dan perempuan dengan ketimpangan modal budaya, ekonomi, hingga simbolik ini tentu telah memberikan jalan mulus bagi laki-laki dengan segala keistimewaannya. Jumlah persentasi yang begitu minim antara perwakilan perempuan dan laki-laki dalam keanggotaan BPD turut menjadi kendala

bagi perempuan dalam memperjuangkan isu-isu perempuan pada kebijakan pemerintah desa Tabanio.

Minimnya jumlah keterpilihan perempuan dalam keanggotaan BPD membuat perempuan tidak mampu memiliki andil yang cukup besar dalam mempengaruhi kebijakan baik internal BPD maupun pemerintah desa. Agustinah merupakan anggota perwakilan unsur perempuan yang terpilih sebagai anggota BPD Tabanio ini kelahiran Samarinda pada tanggal 08 Agustus 1985 dan memiliki pekerjaan sebagai guru di sekolah dasar (agustina, 2022). Bergelar sarjana Pendidikan dari Universitas Terbuka pun tidak mampu membuatnya untuk melawan dominasi laki-laki bahkan menjadi pihak marginal membuatnya menjadi obyek dikte dari laki-laki ditubuh BPD. Hal ini selaras dengan penuturan Ikbal selaku ketua BPD desa Tabanio, "posisi sekretaris kami berikan untuk anggota perempuan, agar dapat membantu hal-hal yang berkaitan dengan administrasi BPD" sehingga nama agustinah tidak pernah ditemukan dalam pertarungan para anggota terpilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua (Muhammad Ikbal, 2022). Agar dapat memahami struktur organisasi BPD yang mana menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antara anggota perempuan dan laki-laki maka dari itu, berikut penulis lampirkan gambar struktur BPD Desa Tabanio periode 2020-2026 pada gambar 2..

Gambar 2. Struktur Organisasi BPD Desa Tabanio



Sumber: Kantor Pemerintah Desa Tabanio

Fenomena dominasi simbolik laki-laki yang terjadi pada perwakilan politik perempuan di Desa Tabanio menunjukkan bahwa Kebijakan afirmasi untuk keterwakilan perempuan di Desa tidak mampu mendobrak praktik dominasi simbolik laki-laki pesisir terhadap perempuan. Kebijakan ini bahkan semakin melegitimasi bahwa ketimpangan politik antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah keniscayaan. Kebijakan afirmasi yang menjamin keterwakilan perempuan namun tidak diimbangi dengan kalkulasi yang matang semakin memarginalkan posisi perempuan sebagai aktor dalam pembuatan kebijakan bagi pemerintah desa.

Krisis kehadiran perempuan mengakibatkan isu-isu perempuan semakin terpinggirkan, bahkan memberikan justifikasi bahwa perempuan tidak cocok untuk berpolitik di Desa Tabanio yang dikenal dengan masyarakat yang dikenal Tangguh, keras, dan kasar. Bahkan menurut pengakuan Agustinah dari hasil wawancara bahwa dirinya seringkali merasa takut jikalau sendirian untuk turut serta berpartisipasi dalam aktivitas politik anggota BPD yang begitu maskulin seperti melakukan protes, demo, hingga perlawanan atas ketidakadilan distribusi sumberdaya seperti solar, sapi, BLT, hingga pengelolaan pantai di desa. Agustinah menjadi salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa kekerasan simbolik bekerja dalam berbagai lapisan sosial hingga politik. Kekerasan simbolik tidak hanya bekerja untuk menciptakan ketimpangan kualitas antara laki-laki dan perempuan namun juga berdampak pada kuantitas representasi perempuan di politik dan menciptakan siklus dalam menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan melalui kebijakan-kebijakan yang asimetris.

Kesimpulan

Studi ini memandang kekerasan simbolik menggunakan beberapa terminologi ekonomi untuk menganalisis proses-proses reproduksi sosial, budaya, dan politik tentang bagaimana berbagai bentuk modal cenderung untuk ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya. Reproduksi kekerasan laki-laki pesisir pada perempuan dan politik, sosial dan budaya ditransformasi dengan metode tindakan pedagogik yang menggunakan komunikasi pedagogi. Pengetahuan dan sejarah laki-laki sebagai modal budaya yang direproduksi untuk mendistingsi dirinya dari kelompok perempuan. Selanjutnya, tindakan hingga kepemilikan pedagogik menjadi fase yang harus dilakukan oleh laki-laki untuk mentransformasi kekerasan dalam ruang privat yaitu keluarga. Perempuan Tabanio dipaksa untuk menerima posisi terdominasi di keluarga karena penguasaan modal ekonomi oleh laki-laki yang berkerja sebagai nelayan sebagai pemberi nafkah utama dalam keluarga dan pekerjaan ini hanya milik laki-laki. tidak hanya itu, transformasi modal budaya juga dilakukan melalui agama yang memberikan Tindakan pedagogic sehingga menjadi modal simbolik yang memberikan otoritas pada ketokohan Habib sebagai pemilik otoritas di masyarakat. Reproduksi kekerasan pada bidang politik merupakan proses formalisasi kekerasan simbolik laki-laki terhadap perempuan yang berlindung dibalik demokrasi. Pemilihan umum layaknya ujian dalam institusi Pendidikan untuk mengeliminasi pihak yang terdominasi yang dapat dibenarkan oleh perempuan. Pemilihan umum menjadi mekanisme yang mempertarungkan ketidakseimbangan posisi laki-laki dan perempuan dipanggung politik, agar Perempuan memandang ketidakberdayaan mereka dalam politik menjadi sesuatu yang benar.

Pesisir merupakan arena kekuasaan yang dibentuk untuk mendukung distingsi para lelaki untuk mempertahankan dominasi simbolik mereka melalui reproduksi

budaya, reproduksi sosial hingga reproduksi politik. Tidak jarang, minimnya eksistensi perempuan di wilayah pesisir dalam praktik kekuasaan hingga literatur bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah namun telah didesain secara terstruktur dan terlegitimasi. Krisis eksistensi perempuan dalam budaya, kemudian berlanjut pada kekerasan sosial hingga kekerasan politik menjadi lingkaran setan bagi perempuan untuk terus menjadi kelompok yang terdominasi. Aturan yang menjamin keterwakilan perempuan pada politik pemerintahan desa melalui Lembaga BPD berakhir sebagai alat justifikasi dominasi laki-laki yang dikemas dengan label demokrasi. Aturan tanpa kalkulasi yang matang hanya menjadikan eksistensi perempuan di BPD yang tidak seimbang baik dari segi kuantitas serta kualitas sehingga semakin menjustifikasi laki-laki sebagai subyek yang begitu piawai dalam berpolitik.

Referensi

- Appelrouth, S., & Edles Laura Desfor. (2021). *Classical & Contemporary Sociological Theory*. SAGE.
- Apriati, Y. (2018). PERAN GENDER DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA NELAYAN DI DESA TABANIO KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN. *In repo*.
- Azhar Firdausi, I., Malik, A., & Sururi, A. (2021). Social Construction of Women Fishermen in Sococultural Patterns and Relationships in Coastal area Karangantu Serang Banten. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 05(No. 2), 172–183. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-Claude. (1990). *Reproduction in education, society and culture*. Sage.
- bpcbkaltim. (2018, April 3). *Keberadaan Benteng Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Bupati Tanah Laut. (2020). *Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 122 Tahun 2020*.
- Chris Jenks. (1993). *Culture (Konsep Budaya)* (Arie Setyaningrum & Novi Kurnia, Eds.). Routledge.
- Creswell, J. W. (2007). *Second Edition, Qualitative Inquiry & Research Design (Choosing Among Five Approaches)* (second edition). Sage Publications Ltd.
- Dorothy Denneen Volo, J. M. V. (2001). *Daily Life in the Age of Sail*. Greenwood. <http://publisher.abc-clio.com/9781573566872>
- Elliot B. Weininger. (2005). *CHAPTER 4. PIERRE BOURDIEU ON SOCIAL CLASS AND SYMBOLIC VIOLENCE*. Cambridge University Press.
- Fahmi. (2018, August 2). *Desa Tabanio "Kampung Pelarian Pangeran Muda Kerajaan Banjar."* Kompasiana.

- Garrett, P. M. (2007). Making social work more Bourdieusian: why the social professions should critically engage with the work of Pierre Bourdieu. *European Journal of Social Work*, 10(2), 225–243. <https://doi.org/10.1080/13691450701318010>
- Harper, S., Zeller, D., Hauzer, M., Pauly, D., & Sumaila, U. R. (2013). Women and fisheries: Contribution to food security and local economies. *Marine Policy*, 39(1), 56–63. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.10.018>
- Jenkins, R., Bourdieu, P., & Nice, R. (1993). The Logic of Practice. *Man*, 28(3), 617. <https://doi.org/10.2307/2804264>
- Kristiyanti Mariana. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan Iczm (Integrated Coastal Zone Management). *Unisbank Semarang*, 2, 752–760.
- M. Albar Robbani Barot Isrofil, & Indria Liestyasari, N. (2015). Peran Sosial Habib dalam Komunitas Sosial (Studi Kasus Majelis Ilmu & Dzikir Ar-Raudhah Surakarta). *Sosialitas; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 5(2).
- MacNeil, A., & Ghosh, S. (2017). Gender imbalance in the maritime industry: Impediments, initiatives and recommendations. *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*, 9(1), 42–55. <https://doi.org/10.1080/18366503.2016.1271262>
- Maliniak, D., Oakes, A., Peterson, S., & Tierney, M. J. (2008). Women in International Relations. In *Politics and Gender* (Vol. 4, Issue 1, pp. 122–144). <https://doi.org/10.1017/S1743923X08000068>
- Mansyur. (2021, March 21). Jejak Awal Sejarah Tabanio. *Maknanews*.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (2016).
- PP Nomor 43 Tahun 2014*. (n.d.).
- Syahril, S. (2014). *Arena Produksi Kultural Dan Kekerasan Simbolik*.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014).